



Presiden Joko Widodo bersama Erick Thohir, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, dan sejumlah petinggi partai politik saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Elite dan Oligark dalam Demokrasi

OLEH: NASRULLAH*

Elite dan oligark adalah penguasa sesungguhnya di banyak negeri. Kedua kelompok kecil ini adalah pemilik kekuasaan istimewa yang membedakannya dengan rakyat kebanyakan.

Professor Jeffrey Winters (2011) dalam karyanya *Oligarchy* sepuluh tahun lalu menerangkan bagaimana oligark menjalankan kekuasaan dari masa ke masa. Termasuk bersekutu dengan elite yang memiliki kekuasaan lain selain kekuasaan atas kekayaan material. Elite memiliki kekuasaan atas hak politik formal, kekuasaan jabatan, kekuasaan mobilisasi, dan kekuasaan koersif (pemaksa). Sementara itu, oligark selain memiliki keempatnya, kekuasaan istemewanya adalah kekuasaan material/kekayaan.

Keuntungan oligark adalah mempertahankan kekuasaan materialnya. Sementara kepentingan elite adalah mempertahankan kedudukannya pada kekuasaan yang dimilikinya. Atau bisa jadi seorang elite berhasrat menjadi seorang oligark. Di titik kepentingan inilah keduanya sering

bersekutu meski tak jarang pula berselisih.

* CATATAN HISTORIS

Di masa kolonial, para peneliti dan sarjana kolonial Belanda mengamati dan mencari tahu dua hal yang dimiliki seorang tokoh yang dimata-matai. Yaitu uang dan senjata yang dimiliki. Artinya, di masa kolonial, potensi perlawanan pemilik uang (kekuasaan material) dan pemilik senjata (kekuasaan koersif) sudah diperhitungkan.

Sebagai contoh, untuk mencari tahu potensi yang dimiliki oleh orang-orang Hadramaut, khususnya keturunan Nabi Muhammad, seorang sarjana Belanda dikirim ke Hadramaut untuk meneliti bagaimana kehidupan orang Hadramaut di Yaman. Selain itu, ditelusuri bagaimana mereka datang ke Nusantara kala itu, apa motifnya, dan siapa saja mereka yang datang.

Di Hadramaut, peneliti mencari tahu, siapa pemilik uang paling banyak dan pemilik senjata paling banyak di masa itu, atau pemilik keduanya. Setelah itu, orang-orang Hadramaut yang datang ke Batavia juga dicari tahu kehidupannya.

Siapa saja yang punya toko, siapa yang punya uang dan aset yang banyak serta punya senjata.

Hal yang dapat direfleksikan adalah rupanya sejak masa kolonial dan mungkin sebelumnya juga, kekuasaan elite adalah instrumen yang sangat diperhatikan secara jeli oleh penguasa. Dalam kasus di atas, elite pemilik kekuasaan koersif dan 'oligark' pemilik kekuasaan material akan dimata-matai oleh Belanda. Akan semakin intens diperhatikan lagi jika seseorang yang memiliki keduanya—uang/kekayaan dan senjata (kekuasaan koersif dan kekuasaan material)—karena mereka merupakan elite sekaligus oligark.

PERILAKU DAN NASIB PARPOL
Praktik mempertahankan kekayaan bahkan semakin memperbanyaknya menyebabkan para oligark berkoalisi dengan elite. Koalisi atau persekutuan ini adalah sebuah tindakan yang bertujuan dalam rangka menghindari 'redistribusi' ke bawah (kepada rakyat) atau akuisisi ke samping (oligark lain) kekayaan para oligark.



NASRULLAH

Para oligark kekinian, termasuk di Indonesia terus berusaha mempertahankan kekayaan mereka dengan berbagai cara. Terutama lewat jalan politik di rezim demokrasi sekalipun.

Di dunia politik, peranan ditentukan. Di dunia politik, aktor adalah partai politik (parpol) berikut 'pemilik partai' dan politisi. Dengan 'memegang' dan 'mengendalikan' partai-partai, dapat dipastikan bidang legislatif di DPR dan koalisi di kabinet eksekutif bisa 'diamankan'.

Dengan begitu, apakah parpol dikuasai dan dikendalikan oleh oligark? Sepenuhnya bisa jadi tidak. Tapi potensi untuk demikian bukan tak mungkin. Selain sebagai pembuat peraturan, fungsi DPR—di mana parpol berperan besar di situ—adalah melakukan fungsi *budgeting*. Uang negara 'dibagi' di lembaga ini bersama eksekutif. Distribusi anggaran hendak di-

arahkan ke mana adalah salah satu hak DPR—tempat parpol bergelut. Tentu, kepentingan oligark juga ada di sini.

Terhusus di Indonesia, parpol sebagai salah satu pilar demokrasi dapat dikatakan diisi oleh para elite bahkan oligark. Beberapa oligark tercatat menjadi anggota, pendiri, hingga menjadi pimpinan parpol. Jadi, oligark di Indonesia, dalam upaya menciptakan pertahanan kekayaannya, sampai menjadi elite di parpol. Baik sebagai pendiri dan ketua umum maupun sebagai anggota. Dengan demikian, parpol seperti itu tidak lagi hanya sebagai pilar demokrasi. Tapi sudah menjadi 'alat' pertahanan kekayaan para oligark.

* MASIAHKAH ADA HARAPAN?

Bisakah oligark dijinakkan? Atau bahkan dikalahkan sekaligus? Jawabannya bisa dan tergantung pada syarat-syaratnya. Selama ada kekuatan yang mampu mengendalikan negara selain oligark untuk membuat oligark tunduk pada negara, hal itu tidak mustahil dilakukan.

Prof Jeffrey Winters menegaskan, salah satu yang paling bisa

menjadikan kuatnya peran negara dan menundukkan oligark, bahkan mendistribusi kekayaan material para oligark adalah kekuasaan *grass root* yang terorganisasi. Seperti mengusir penjajah di masa kolonial, 'menjinakkan' dan 'menundukkan' oligark salah satunya masih mengandalkan kekuatan *'grass root'* (akar rumput) dan masyarakat sipil yang kuat. Supremasi hukum dan redistribusi material hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat sipil dan gerakan *grass root* yang kuat.

Upaya mendistribusi penguasaan kekayaan material secara adil dan merata adalah kunci menjawab ketimpangan yang ada oleh sistem oligarki ini. Karena ketimpangan penguasaan materiallah yang menciptakan oligarki dan melahirkan para oligark. Ketika ketimpangan itu hilang dan distribusi kekayaan material merata, oligarki dengan para oligarknya juga akan hilang dengan sendirinya. Dari kondisi itu, demokrasi akhirnya kembali menjadi milik rakyat (*demos*). Dan, bisa jadi para elite tiba-tiba akan berpaling dari persekutuannya dengan para oligark. Mungkinkah? (*Dosen FIB-Ummul Samarinda)

Menikmati TV Digital Terrestrial di Bumi Etam

OLEH: BAWON KUATNO*

SAAT ini masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah dapat menikmati siaran televisi digital dengan kualitas gambar yang bersih dan suara yang jernih. Adapun TV digital tersebut adalah TVRI Kalimantan Timur, TVRI Nasional, TVRI 3 Budaya, TVRI Sport HD, TRANS 7, TRANS TV, KOMPAS TV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Metro TV, MAGNA Channel, BNTV, SCTV, INDOSIAR, O Channel dan Mentari TV. Sejumlah TV digital tersebut dapat dinikmati sepenuhnya secara gratis atau tidak berbayar.

Untuk dapat menangkap siaran televisi digital sangat sederhana dan mudah. Bagi pesawat televisi seri keluaran terbaru (*smart tv*) rata-rata sudah dilengkapi dengan teknologi DVB-T atau DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terrestrial*). Pesawat televisi ini dapat menerima siaran televisi digital tanpa perlu perangkat tambahan.

Cukup dengan antena luar UHF yang disambungkan ke pesawat televisi, maka beragam siaran TV digital sebagaimana tersebut di atas dapat dinikmati sepuas mungkin. Selain itu, siaran digital juga

dapat diterima televisi seri keluaran yang lama (TV analog), yang dikenal dengan sebutan TV tabung dan sejenisnya.

Untuk menerimanya diperlukan perangkat tambahan berupa *set top box* atau *decoder*. *Set top box* berfungsi mengubah signal digital yang diterima oleh antena menjadi signal analog, untuk diteruskan ke televisi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik. Tampilan gambar yang bersih dan suara yang jernih adalah salah satu keunggulan TV digital. Gambar berbintik, bersemut dan berbayang sebagaimana pada TV analog tidak akan dijumpai pada TV digital.

Adapun televisi digital atau juga dikenal dengan TV digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar adalah jenis penyelenggaraan penyiaran televisi yang menggunakan modulasi digital dengan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi.

Salah satu amanat penting Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor penyiaran adalah keharusan penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti perkembangan

teknologi serta adanya batasan waktu untuk migrasi penyiaran televisi teresterial dari teknologi analog ke teknologi digital. Migrasi tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku pada 2 November 2022. Dengan harapan masyarakat dapat menikmati siaran televisi yang lebih berkualitas seiring kemajuan teknologi.

Adapun sebaran siaran digital dapat diterima di wilayah Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat. Siaran digital, penyelenggaraan penyiarannya disalurkan melalui penyelenggara *multipleksing (mux)*. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menetapkan 4 lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran *multipleksing* melalui sistem teresterial di Kaltim. Adapun lembaga penyiaran tersebut adalah Televisi Republik Indo-

nesia (TVRI), PT Trans 7 Pontianak Samarinda (TRANS 7), PT Surya Citra Multikreasi (SCTV), PT Media Televisi Banjarmasin (METRO TV).

Pertama, penyelenggara *multipleksing* TVRI hadir di kanal 28 UHF. Saat ini, di kanal tersebut hadir program siaran TVRI Kalimantan Timur, TVRI Nasional, TVRI 3 Budaya dan TVRI Sport HD. Keempat program siaran TVRI itu dapat dinikmati di wilayah Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau dan Kutai Barat.

Kedua, penyelenggara *multipleksing* TRANS 7 di kanal 31 UHF dengan program siaran TRANS 7, TRANS TV, CNBC INDONESIA, CNN INDONESIA dan KOMPAS TV. Kelima program siaran tersebut dapat disaksikan di wilayah Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Ketiga, penyelenggara *multipleksing* SCTV berada di kanal 36 UHF. Hadir 4 program siaran di kanal ini



BAWON KUATNO

yaitu SCTV, INDOSIAR, MENTARI TV, dan O CHANNEL. Wilayah yang dapat menangkap siaran tersebut adalah Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.

Keempat, penyelenggara *multipleksing* METRO TV hadir di kanal 40 UHF. Saat ini berisi 3 program siaran yaitu METRO TV, MAGNA Channel dan BNTV. Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat merupakan wilayah yang dapat menangkap seluruh program dari *multipleksing* METRO TV tersebut.

Satu penyelenggara *multipleksing (mux)* dapat menampung 10-15 program siaran televisi. Ini artinya jika keempat penyelenggara *multipleksing* tersebut terisi penuh, maka sedikitnya ada 40-60 program siaran televisi digital yang dapat dinikmati secara gratis dan berseliweran menghiasi layar kaca masyarakat Kaltim.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim sebagai lembaga negara independen, salah satu tugasnya membantu penguatan infrastruktur bidang penyiaran di daerah, terus berupaya

mendorong lembaga penyiaran televisi untuk segera bermigrasi bersiaran dengan teknologi terbaru atau digital.

Dalam catatan KPID Kaltim, masih ada 16 lembaga penyiaran televisi yang masih bersiaran secara analog. KPID berharap lembaga penyiaran tersebut dapat segera bergabung dan memilih salah satu penyelenggara *multipleksing* yang beroperasi di Kaltim.

Hal ini merupakan komitmen pelayanan KPID. Agar masyarakat dapat menikmati siaran dengan kualitas terbaik. Terlebih televisi merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat. Apalagi di saat pandemi, intensitas interaksi dengan televisi meningkat tajam. Rata-rata orang menghabiskan waktu menonton televisi 5 jam 37 menit per hari.

Kehadiran teknologi terbaru tersebut akan semakin mendekatkan lembaga penyiaran pada masyarakat. Masyarakat dapat menikmati program siaran pilihannya dengan kualitas gambar yang bersih, teknologi yang canggih dan suara yang jernih. Maka tunggu apalagi, mari beralih ke TV digital. (*Wakil Ketua KPID Kaltim)